

## ABSTRAK

### **YUMNA ADELIA FAIHA., 30301308297, 2017 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN ATAS PELAYANAN JASA DAN PRAKTIK TUKANG GIGI DI KOTA SEMARANG.**

Pada era yang makin modern penampilan merupakan penunjang utama dari rasa percaya diri, bagi sebagian orang memiliki gigi yang tidak rapi atau berjejal akan mengurangi rasa percaya diri maka dipilihlah perawatan ortodonti yakni *behel* untuk memperindah estetika. Mahalnya perawatan ortodonti di dokter gigi maka para konsumen mencari alternatif untuk memasang *behel* di tukang gigi. Maka perlu ditinjaulah apa kewenangan tukang gigi berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perawatan ortodonti di tukang gigi dan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan praktik di luar kewenangannya.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang mempunyai objek kajian atau aturan hukum yang memberikan gambaran fakta yang ditunjang dengan metode yuridis empiris yaitu didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan tukang gigi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu yang pertama membuat gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan yang kedua gigi tiruan yang dibuat tidak boleh menutupi sisa akar gigi, namun tidak semua tukang gigi di Kota Semarang melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum bagi pasien yang mendapat kerugian setelah melakukan perawatan ortodonti tukang gigi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan maupun menyelesaikan sengketa secara damai (*win-win solution*). Tanggung jawab pemerintah melakukan pembinaan dan juga pengawasan kepada para tukang gigi, terhadap para tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya pemerintah memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tukang Gigi, Ortodonti**

## **ABSTRACT**

**YUMNA ADELIA FAIHA., 30301308297, 2017 LEGAL PROTECTION OF PATIENTS AS CONSUMERS OVER SERVICES AND PRACTICE DENTAL WORKER SEMARANG CITY.**

## **ABSTRACT**

**YUMNA ADELIA FAIHA., 30301308297, 2017 LEGAL PROTECTION OF PATIENTS AS CONSUMERS OVER SERVICES AND PRACTICE DENTAL WORKER SEMARANG CITY.**

On a more modern era, appearance is the main support of self-confidence. For some people have teeth that are not neat or jostling will reduce confidence, then the orthodontic treatment was i.e. the Stirrup to embellish the aesthetics. Expensive orthodontic treatments at the dentist, then consumers looking for alternatives to install the Stirrup on the dental worker. Therefore need to be reviewed how the authority dental worker based on the regulations at this time, how legal protection of consumers who do care in orthodontic dental worker and how government responsibility towards dental worker practice outside of those powers.

This research method using normative juridical approach i.e. research which had the object of study or the rule of law that gives an overview of the facts supported by empirical juridical method that is based on the facts that are in the the field.

Based on the results of the study it was concluded that the authority then dental worker is set up in the regulation of the Minister of health the number 39 Year 2014 about coaching, supervision and licensing of work Dental Worker in article 6 paragraph (2) that is the first to make denture acrylic material which may comply with the health requirements and the second made dentures should not cover the rest of the tooth root, but not all dental worker in Semarang city do work in accordance with the authority that has been set. Legal protection for patients who got the loss after orthodontic treatment of dental worker can file a lawsuit to the Court as well as resolve disputes amicably (win-win solution). The responsibility of the Government doing coaching and supervision to the dental workers, teeth that do work outside its Government provides administrative sanction in the form of a written reprimand, temporary revocation and permanent revocation.

**Keywords: Legal Protection, Dental Worker, Orthodontics**